

**OPTIMALISASI PENDAPATAN TANAH KAS DESA DI DESA BATANG
BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2009-2013**

Oleh:

Yoga Setiawan

(yogasetiawan@yahoo89.co.id)

Pembimbing : Auradian Marta, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In the current era of village autonomy, PADesa an important benchmark for the village's ability to organize and menwujudkan village autonomy, also reflects the independence of a village because PADesa is a source of pure acceptance of the village. However, if walking is not optimal PADesa it will be difficult for the village to carry out the process of governance and development independently, without the support of other parties. This occurred in the village of Batang Batindih in optimizing its income receipts. Especially PADesa sourced from Land Kas village, so the village was not optimal in receiving the income generated from the land of the village of Kas. The purpose of this study was to determine the constraints and efforts in optimizing the village of Batang Batindih Pades sourced from Cash Land Village.

The theory used in this research is autonomy village, Policies, and Institutions. The method used in this study is a qualitative approach. The technique used for collecting data are observation, interview, and documentation, then analyzed using descriptive analysis method. Source interviews in this study came from informants by using purposive sampling technique Informanyaitu parties know the constraints and the village of Batang Batindih efforts in optimizing the potential of the ground the village treasury.

Results from this study indicate that the village of Batang Batindih has a huge potential source of income for villagers who came from the village of Kas Land. Constraints in optimizing cash income rural land in the village of Batang Batindih form; Village Regulation (Perdes) which has not been ratified, Perdes here synchronizes with the theory of Village Autonomy. The main key of Village Autonomy participation, proactive and community initiative and self-reliance. Implementation of institutional authority have not been up that includes; Low competence village government officials, as well as the level of public education is still low. Authority here synchronize with the policy theory. There are several characteristics of policies, namely; there must be tujuanya policy, the policy does not stand alone, the policy is what the government and the policy should be based on the law. Institutional capacity is not maximized village which includes; lack of capacity, initiative, creativity and tanggung responsible for the ground the village treasury. Here institutional synchronizes with institutional theory There are five (5) opinion regarding the institutional system; communications systems, economic systems, the system agreement,

the system of authority and power sharing and ritual system to maintain social ties that ada. Sedangkan efforts to address these obstacles in the form; Increase community participation in the form; deliberation, rapat, partisipasi is associated with the theory of village autonomy. Enhance Institutional Capacity in the form of village government; Training, discussion. Institutional is associated with institutional theory. And empower communities to participate in the Cash Land Village. Empower is associated with the policy theory.

Keywords: ground the village treasury, revenue village.

Latar Belakang Masalah

Perlu disadari oleh kita semua, bahwa pengertian desa adalah istilah atau pengertian yang beranekaragam. Desa menurut Hanif Nurcholis adalah Suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Pembagian secara administratif wilayah Negara Indonesia terdiri atas wilayah yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Disamping desa dalam pengertian administratif, dapat dijumpai juga jenis desa dengan menerapkan kriteria yang lain, misal berdasarkan topografi: desa pegunungan, desa dataran rendah, desa dataran tinggi, desa pantai; kemungkinan juga dapat didasarkan pada kriteria jenis usahanya, yaitu kampong peladang berpindah-pindah, desa perkebunan rakyat, desa nelayan, dan Lainnya.

Tanah Kas Desa haruslah dikelola dan di olah secara maksimal, guna menunjang kontribusi dalam pemasukan atau pendapatan di desa tersebut. Tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi/adat istiadat yang berkembang dan hidup dikalangan masyarakat. Hasil dari Tanah Kas Desa ini dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan rumah tangga desa,

termasuk tunjangan bagi kepala desa dan perangkatnya.

Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar adalah desa Exs Transmigrasi yang berdiri Tanggal 10 Juni Tahun 1989. Sebagai desa yang baru, desa batang batindih mempunyai Pendapatan Asli Desa (PAD) yang cukup besar. Hal ini dibuktikan dari rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) yang disusun oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Tanah Kas Desa yang ada di Desa Batang Batindih terbagi menjadi 2 bagian, yang pertama adalah kebun desa yang berjumlah 10 Ha, dari total jumlah luas kebun desa yang luasnya 10 Ha tersebut sudah ditanami kelapa sawit. Yang ke dua adalah Tanah Restan (Tanah R) yang luasnya 10,5 Ha. Tanah Restan ini terletak di pemukiman masyarakat Desa Batang Batindih.

Berdasarkan uraian diatas yang membahas tentang Optimalisasi Pendapatan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, disini membahas tentang Optimalisasi Pendapatan dari pengelolaan Tanah Kas Desa yang diolah oleh Masyarakat di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, mengapa pendapatan dari Tanah Kas Desa itu tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Desa

Batang Batindih, karena sejauh ini pendapatan yang masuk di kas Desa Batang Batindih terhitung dari Tahun 2009 sampai dengan 2013 selalu kurang dan tidak memenuhi total target yang di harapkan. Dirumuskanlah masalah sebagai berikut : ***“Mengapa Pendapatan desa dari tanah kas desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2009-2013 tidak optimal”?***

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak Optimalnya Pendapatan Tanah Kas Desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan desa dalam mengoptimalkan pendapatan asli Desa khususnya pemanfaatan Tanah Kas Desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Pendalaman dalam hal kinerja Pemerintah Desa Baik itu Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
- b. Bagi Penelitian selanjutnya dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dengan masalah yang lebih luas.

Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka sebelum membahas Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Melalui Penerimaan Pendapatan Tanah

Kas Desa Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2009-2013, maka penulis menggunakan landasan penelitian dengan mengemukakan kerangka Teoritis yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

Otonomi Desa

Menurut Siregar (2002:176), yang dimaksud dengan Otonomi desa adalah otoritas yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk menentukan nasib dan mengatur segala urusanya sendiri, termasuk membentuk pemerintahan dan menentukan skema penyelenggaraan kekuasaan lokal, yang kesemuanya itu didasarkan pada kemandirian, partisipasi dan prakarsa masyarakat setempat.

Hanya dengan otonomi, Desa akan bangkit dan dapat menata kehidupan sosial ekonomi dan politiknya secara sehat dan berdaya. Tanpa ada otonomi, kewenangan politik dan semangat untuk melahirkan prakarsa dan inisiatif dari bawah, desa kembali menjadi “bulan-bulanan”. Dampaknya adalah warga desa akan tetap saja diabaikan aspirasinya, dipangkas aksesnya dan dilucuti gerak kontrolnya oleh supra desa. (Rozaki, 2004:vii).

Selanjutnya menurut Pambudi (2003:v) Otonomi Desa merupakan sebuah harapan untuk desa masa depan. Gagasan ini merupakan suatu bentuk koreksi dan sekaligus ancangan untuk masa depan. Sebagai sebuah koreksi, otonomi desa dimaksudkan untuk memberikan makna baru pada desa dan dengan sendirinya memuat dua dimensi penting, yakni pengakuan dan pemulihan atas apa yang dirusakan sepanjang kekuasaan Orde Lama. Selain itu, gagasan ini memuat pula mengenai konstruksi Desa masa depan, yaitu

sebuah bentuk ideal yang hendak dicapai.

Kebijakan

Istilah 'kebijakan' dalam bahasa Inggris '*policy*' yang berasal dari bahasa latin, yaitu kata *polis* yang artinya *community* atau paguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau *city* (Negara kota). Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta adalah '*polis*' (Negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan sedangkan dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan "*policie*", yang menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. (William N. Dunn, 2003:51)

Menurut Anderson (dalam Abidin, 2002 : 39) ada beberapa ciri dari kebijakan yaitu :

1. Kebijakan harus ada tujuannya
2. Kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan lain
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah
4. Kebijakan harus didasarkan pada hukum

Teori Kelembagaan

Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kata kelembagaan berasal dari istilah lembaga (*Institution*) yang berarti instansi, yang dimana secara garis besar kelembagaan diartikan sebagai suatu organisasi bagi individu-individu yang didalamnya bertujuan untuk membuat keputusan dan melaksanakan segala aktivitas yang menyangkut tentang lembaganya sendiri.

Menurut pendapat Bottomore dalam Israel Arturo (1990:14) kelembagaan adalah suatu sistem organisasi dan kontrol terhadap sumber

daya, apabila dipandang dari sudut individu, kelembagaan merupakan gugus atau peluang kesempatan bagi individu-individu dalam membuat keputusan dan melaksanakan aktivitasnya.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari peneliti (argumentasi peneliti) yang dilandasi dengan konsep-konsep dan teori yang relevan guna memecahkan masalah penelitian. Kerangka pemikiran akan melahirkan asumsi-asumsi yang dapat digunakan dalam membangun hipotesis. Dalam penelitian kualitatif diperlukan kerangka pemikiran karena merupakan kerangka dasar perumusan hipotesis. Pada penelitian kualitatif tidak menguji hipotesis melainkan gambaran tentang keterkaitan antar variabel penelitian yang akan dikaji, yang akan dibangun oleh peneliti untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan penelitian berdasarkan hasil tinjauan pustaka. (Eonoe, World Press: 2010)

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Kualitatif. Menurut Moleong (2007 : 7) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif memiliki manfaat diantaranya; untuk memahami isu-isu rumit suatu proses, untuk memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang

dihadapi seseorang (kelompok), untuk memahami isu-isu sensitif, untuk keperluan evaluasi, dan digunakan oleh peneliti bermaksud untuk meneliti sesuatu secara mendalam.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini Penulis lakukan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2014 hingga februari 2015, dengan alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan adanya gejala kurang optimalnya Pendapatan Asli Desa khususnya Tanah Kas Desa, yaitu tidak maksimalnya pemasukan hasil dari Tanah Kas Desa dalam 5 Tahun terakhir terhitung dari tahun 2009-2013, hasil komulatif yang didapat dari pemasukan Tanah Kas Desa adalah 60% dalam kurun waktu 5 tahun, hal ini tidak sesuai dari yang diharapkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Seharusnya sebagai salah satu Pendapatan Asli Desa yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pemasukan desa, Tanah Kas Desa bisa membantu dalam segi perekonomian desa sehingga dapat terciptanya kehidupan yang lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Informan melalui penelitian lapangan, berupa informasi guna memperoleh jawaban dari permasalahan melalui hasil wawancara yang meliputi:
 1. Tidak Optimalnya penerimaan pendapatan Desa dari Tanah Kas Desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio

Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2009-2013.

2. Upaya Mengoptimalkan Tanah Kas Desa dengan cara Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah desa, Meningkatkan Kesadaran dalam menangani status PERDES, serta Memberdayakan masyarakat ikut berinisiatif serta berpartisipasi dan kreatifitas untuk tanah kas desa.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang didapat secara langsung dilapangan penelitian maupun perpustakaan yang meliputi:
 1. Gambaran umum Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Arsip, Data, Laporan, Buku peraturan Perundang – undangan, dan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
 2. Peraturan Desa (PERDES)
 3. Dokumen- Dokumen tentang Pemerintahan Desa, Sosial Budaya, Sarana Prasarana, dan Pendidikan.

3. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Informan. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan. Informan adalah salah satu istilah yang memberikan pengertian kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberi data dalam bentuk informasi yang ia ketahui. Teknik penarikan

informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik atau cara pengambilan informan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Teknik Wawancara
Wawancara, yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden (Gulo, 2005 : 117).
- b. Teknik Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2007 : 82).

Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Analisa Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan data yang ada dari sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menyelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian. Setelah data dan bahan penelitian yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dipilih dan dikelompokkan menurut jenis dan analisa secara kualitatif.

OPTIMALISASI PENDAPATAN TANAH KAS DESA DI DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009-2013

A. Kendala-kendala dalam Pendapatan Tanah Kas Desa

1. Peraturan Desa (PERDES) yang belum disahkan

Desa Batang Batindih sejak berdiri pada tanggal 10 Juni 1989 sampai tahun 2005 tidak memiliki aturan yang jelas tentang pengelolaan serta pemanfaatan dari tanah kas desa. Pada kurun waktu 16 tahun itu tanah kas desa dipergunakan masyarakat sesuka hati mereka. Barulah pada tahun 2006 pada masa pemerintahan bapak Lasdi sebagai kepala desa surat Keputusan Kepala Desa terkait Pengelolaan Tanah Kas Desa di buat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tahun 2006 Desa Batang Batindih telah membuat Surat Keputusan Kepala Desa lalu di tahun 2012 Badan Permusyawaratan Desa membuat Peraturan Desa (PERDES) terkait tanah kas desa yang di kelola sampai saat ini. Akan tetapi dalam perjalananya peraturan mengenai pengelolaan tanah kas desa dari surat keputusan kepala desa sampai di buatnya PERDES, secara fakta dilapangan masih saja terjadinya kecemburuan sosial diantara masyarakat yang mengelola dan yang tidak mengelola. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang mengelola usahanya atau perkebunanya diatas tanah kas desa namun tidak membayar sewa atas tanah kas desa tersebut kepada Pemerintah Desa. Hal inilah yang membuat masyarakat yang tidak mengelola merasa iri dan meminta keadilan kepada pemerintah desa.

Tabel 3.1.
Daftar Tabel Nama Pengelola, Luas, Jenis Tanaman dan Lama Sewa Tanah Restan di
Desa Batang Batindih

No	Nama Pengelola	Luas	Jenis Tanaman	Lama Sewa
1	Satiman	0,1 Ha	Kolam Ikan	1 Tahun
2	Neman	0,1 Ha	Kolam Ikan	1 Tahun
3	Toharudin	0,1 Ha	Kolam Ikan	1 Tahun
4	Koko	0,1 Ha	Kolam Ikan	1 Tahun
5	Joko	0,1 Ha	Kolam Ikan	1 Tahun
6	Sumino	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
7	Lanjar	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
8	Atma	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
9	Sumarjono	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
10	Hendra	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
11	Supartijan	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
12	Sudiyono	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
13	Supani	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
14	Gito Prasojo	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
15	Kartijo	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
16	Tarmidzi	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
17	Wiwin	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
18	Jaimin	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
19	H.Paidi Gunadi	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
20	Sariman	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
21	Tarya	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
22	Sumisno	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
23	Waluyo	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
24	Leman	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun
25	Arul	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun

Sumber: Kantor Desa Batang Batindih, 2013.

2. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Belum Maksimal

Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat dalam memajukan desa dan kesejahteraan masyarakat masih dianggap kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang ada di desa, antara lain masih kurangnya program peraturan, pembanguna sehingga sarana dan Prasarana desa masih kurang terutama untuk mendukung perkembangan potensi desa.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa fenomena yang terjadi pada pemerintah Desa Batang Batindih antara lain masih kurangnya program peraturan desa dan kebijakan pembangunan desa oleh pemerintah Desa Batang Batindih, terutama dalam melengkapi sarana-prasarana desa sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian fenomena yang terdapat pada pemerintah desa ialah masih kurang disiplinya aparat pemerintah desa yang menyebabkan kantor desa sering sepi. Fenomena lainnya ialah masih kurang baiknya administrasi desa seperti

pencatatan dan pendataan desa kurang lengkap, salah satu contohnya data penyusunan monografi desa kurang diperbarui.

Berdasarkan wawancara dua tokoh masyarakat Desa Batang Batindih tersebut dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab kurang optimalnya pemerintahan desa :

- 1) Masih rendahnya sumber daya manusia dalam mengetahui tugas dan kinerjanya sebagai aparatur pemerintah desa, hal ini dilihat dari tingkat pendidikan aparat

pemerintah desa seperti kepala desa, kepala urusan dan kepala dusun yang rata-rata berpendidikan SMA. Hanya, sekretaris Desa yang berpendidikan Sarjana (S1). Kepala Desa Batang Batindih hanya tamatan SMA, padahal untuk memimpin masyarakat sangat dibutuhkan pemimpin yang memiliki wawasan luas dan pendidikan yang memadai. Untuk melihat tingkat pendidikan aparat Pemerintahan Desa Batang Batindih dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Tingkat Pendidikan aparat Pemerintahan Desa Batang Batindih

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	M. Thoha	Kepala Desa	SMA
2	Nur Qomar S.Pd. I	Sekretaris Desa	S1
3	Teguh Setiawan	Kaur Pemerintahan	SMA
4	Suhada	Kaur Umum	SMA
5	Yulianto	Kaur Keuangan	SMA
6	Taharudin	Kaur Pembangunan	PGA
7	M. Nurjinan	Kepala Dusun I	SPG
8	Solihin	Kepala Dusun II	SMA
9	Riswan Ghazali	Kepala Dusun III	SMA

Sumber : Kantor Desa Batang Batindih, 2014.

- 2) Kurang maksimalnya kinerja aparat pemerintah desa disebabkan tunjangan aparat pemerintah desa yang dirasa belum mencukupi, terutama bagi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga sehingga tidak maksimalnya penyelenggaraan pemerintah desa karena lebih aktif di wilayah profesi lain yang tidak berhubungan dengan tugas, pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa. Adapun jumlah penghasilan tetap aparat pemerintah Desa Batang

masyarakat disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan masyarakat desa Batang Batindih yang umumnya berpendidikan tamatan SD, lalu tamatan SMP dan SMA yang jumlahnya hanya setengah dari tamatan SD, sehingga pengetahuan dan wawasan mereka masih kurang dalam memberi aspirasi dan suara, baik untuk pemerintah desa maupun untuk kemajuan dan pembangunan desa.

A. Lemahnya Perencanaan Pemerintahan Desa

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah desa masih terbelang belum maksimal. hal ini bisa dilihat dari tidak adanya perencanaan di Anggaran

Berdasarkan wawancara Ketua BPD Batang Batindih dan salah satu tokoh masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya partisipasi

Perencanaan Belanja Desa (APBDes) yang membahas mengenai Pelatihan atau Diklat terkait dengan Tanah Kas Desa.

B. Lemahnya Pengawasan terhadap Pengelola Tanah Kas Desa

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2009-2013 pendapatan hasil dari tanah kas desa menurun dan dapat dikatakan tidak stabil karena cenderung terjadi defisit atau kerugian untuk pemasukan desa.

Terhitung hanya 46% dari 100% total target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD yang terhitung dari tahun 2009-2013. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan pemerintah desa terhadap pengelola tanah kas desa.

Seperti yang dijelaskan oleh Ketua BPD Bapak Saetun S.Pd pada saat

4 Partisipasi Masyarakat Rendah

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas didalam masyarakat. Secara garis besar, pendidikan sebagai pelebagaan upaya-upaya pengembangan sumber daya

manusia sehingga memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas yang berdampak pada perkembangan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya memberi kemajuan desa itu sendiri. Namun sebaliknya, jika pendidikan yang ada pada masyarakat masih kurang baik, dapat menyebabkan rendahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat, sehingga kurang majunya perkembangan desa beserta potensi-potensi yang ada seperti halnya Desa Batang Batindih.

Banyak fenomena yang disebabkan kurangnya pendidikan masyarakat di Desa Batang Batindih seperti kurangnya pendidikan masyarakat menyebabkan rendahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam memberi aspirasi mereka seperti kritik saran dan masukan terkait Tanah Kas Desa yang menjadi titik permasalahan di desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar untuk memajukan desa dan mensejahterahkan masyarakatnya.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan jumlah sarana pendidikan Desa Batang Batindih dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Jumlah sarana pendidikan Desa Batang Batindih

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	MDA	1
2.	PAUD	1
3.	TK	1
4.	SD/ Sederajat	1
5.	SLTP/ Sederajat	1
6.	SLTA/ Sederajat	0
7.	PKBM	1
	Total Jumlah	6

Sumber: Kantor Desa Batang Batindih, 2013.

Tabel 3.4.
Jumlah penduduk desa Batang Batindih berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	95
2.	Tidak tamat SMP	20
3.	Tidak tamat SMA	10
4.	SD sederajat	410
5.	SMP sederajat	399
6.	SMA sederajat	350
7.	Sarjana	20
8.	Tidak atau belum sekolah	941
	Total Jumlah	2.245

Sumber: Kantor Desa Batang Batindih, 2013.

Tabel 3.5.
Daftar Tabel Masyarakat Pengelola Tanah Kas Desa yang Sudah dan Belum Membayar Sewa Tanah Kas Desa

No	Nama Pengelola	Luas	Jenis Tanaman	Lama Sewa	Sudah Bayar	Belum Bayar
1	Satiman	0,1 Ha	Kolam Ikan	1 Tahun		Blm byr
2	Neman	0,1 Ha	Kolam Ikan	1 Tahun		Blm byr
3	Toharudin	0,1 Ha	Kolam Ikan	1 Tahun		Blm byr
4	Koko	0,1 Ha	Kolam Ikan	1 Tahun		Blm byr
5	Joko	0,1 Ha	Kolam Ikan	1 Tahun		Blm byr
6	Sumino	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
7	Lanjar	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
8	Atma	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
9	Sumarjono	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
10	Hendra	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
11	Supartijan	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun	Sdh byr	
12	Sudiyono	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
13	Supani	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
14	Gito Prasajo	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun	Sdh byr	
15	Kartijo	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun	Sdh byr	
16	Tarmidzi	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
17	Wiwin	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun	Sdh byr	
18	Jaimin	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun	Sdh byr	
19	H.Paidi	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
20	Sariman	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
21	Tarya	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
22	Sumisno	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
23	Waluyo	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
24	Leman	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr
25	Edi Elijon	0,5 Ha	Kelapa Sawit	1 Tahun		Blm byr

Sumber: Kantor Desa Batang Batindih, 2013.

Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya warga Masyarakat Desa Batang batindih yang belum membayar kewajibanya. Dari 21 orang warga Masyarakat Desa Batang batindih yang mengelola hanya 5 orang yang membayar sewa tanah kas desa di tahun 2013 dan 20 orang lainnya belum membayar sampai saat ini.

Disini dapat terlihat bahwa rendahnya partisipasi masyarakat Desa Batang batindih juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Batang batindih sehingga apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibanya tidak dilaksanakan mereka hanya condong mengambil keuntungan dari hasil yang mereka tanah di atas Tanah Kas Desa untuk menambah kebutuhan hidup mereka masing-masing.

B. Upaya-Upaya Mengoptimalisasikan Pendapatan Tanah Kas Desa

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa

A. Pelatihan

Pada penelitian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kinerja Pemerintah Desa Batang Batindih masih kurang maksimal, kurang baiknya administrasi desa, kurangnya inisiatif dan upaya pemerintah desa dalam memperoleh sumber pendapatan asli desa khususnya tanah kas desa dan belum disahkannya peraturan desa mengenai Tanah Kas Desa. Oleh karena fenomena-fenomena tersebut, maka perlu ada upaya peningkatkan kinerja pemerintah desa.

B. Kedisiplinan

Kemudian pada saat wawancara tanggal 25 Desember 2014, Ketua BPD Batang Batindih bapak Saetun

S.Pd juga menambahkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa :

C. Perencanaan

Perencanaan merupakan hal yang sangat teliti dan teroganisir keputusanya sehingga kedepanya tidak ada hal-hal buruk yang terjadi. Oleh karena itu perencanaan yang baik haruslah dibarengi dengan ide dan pemikiran yang baik pula, yang berguna untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakatnya bukan untuk sebaliknya menimbulkan konflik diantara masyarakat.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

A. Musyawarah

Sebelumnya kita ketahui bahwa Pemerintah Desa Batang Batindih kurang berupaya dalam mengembangkan potensi sumber pendapatan asli desa yang di hasilkan dari sumber pendapatan tanah kas desa, yang merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap desa dari beberapa sumber pendapatan desa yang lainnya. Dengan fenomena yang seperti itulah seharusnya pemerintah desa bisa melihat dan lebih aktif serta memiliki rasa tanggung jawab agar dapat secepatnya menerapkan serta mengimplementasikan apa yang sudah di musyawarahkan BPD bersama kepala desa dengan secepatnya mendapat pengesahan atas PERDES yang telah dibuat dan di antarkan ke pemerintah Kabupaten Bangkinang. Sehingga di tahun-tahun berikutnya tidak lagi terjadi defisit pendapatan di tanah kas desa, dan desa pun dapat kembali menjalankan tugasnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan

membangun sarana dan prasarana terkait pendidikan, pemerintahan, kesehatan, transportasi, lingkungan hidup, sosial dan budaya.

B. Sosialisasi

Pada penelitian sebelumnya, dijelaskan bahwa masyarakat Desa Batang Batindih hanya terfokus pada pengembangan potensi perkebunan sawit yang menjadi mata pencaharian mereka, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan aspirasi suara mereka untuk Tanah Kas Desa yang disebabkan masih rendahnya pengetahuan, pendidikan dan wawasan masyarakat. Sumber daya manusia yang memadai dan mampu memberikan suara dan aspirasinya guna menciptakan perubahan dan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa masih kurang, untuk itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh LPM Desa Batang Batindih.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Batang Batindih mengenai hambatan-hambatan dan upaya dalam meningkatkan Penerimaan Pendapatan Tanah Kas Desa Batang Batindih, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Desa Batang Batindih memiliki Sumber Pendapatan Asli Desa yang dapat mensejahterakan masyarakat Desa Batang Batindih, yaitu Sumber Pendapatan Leges, Tanah Kas Desa, Iuran Masyarakat, dan Pasar. Walaupun Desa Batang Batindih memiliki beberapa Sumber Pendapatan Asli Desa, namun Desa Batang Batindih memiliki kendala dari beberapa sumber PADes

tersebut ada salah satu sumber yang penerimaan Pendapatannya tidak optimal. Yaitu Tanah Kas Desa. Adapun kendala – kendala yang terjadi berupa regulasi peraturan (PERDES) yang belum disahkan, rendahnya sumber daya manusia dalam mengetahui tugas dan kinerjanya sebagai aparatur pemerintah desa, kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam memanfaatkan pendapatan asli desa khususnya tanah kas desa, kurangnya partisipasi dan tanggung jawab masyarakat desa terhadap tanah kas desa, dan tingkat masyarakat desa yang masih rendah.

2. Untuk mengatasi kendala desa dalam penerimaan pendapatan tanah kas desa, maka dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangnya, yaitu meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab pemerintah desa agar lebih aktif dalam menangani pertauran desa (PERDES), meningkatkan sumber daya manusia dalam mengetahui tugas dan kinerjanya sebagai aparatur pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan Aspirasi dan inovasi (perubahan) untuk optimalisasi penerimaan pendapatan tanah kas desa di desa batang batindih kecamatan rumbio jaya kabupaten kampar.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan – kesimpulan yang diambil, maka selanjutnya diusulkan beberapa saran yang hendaknya dapat diterapkan dan bermanfaat dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan tanah kas desa. Adapun saran-saran yang akan diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa harus lebih aktif dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi guna mempercepat proses pengesahan Peraturan Desa (PERDES) yang sudah hampir dua (2) tahun lebih tidak adanya kejelasan di tingkat kabupaten, Sehingga pemerintah desa tidak terhambat dalam memungut iuran atas sewa tanah kas desa dan sumber pendapatan asli desa yang lainnya. Dan Pemerintah Desa tidak lagi ragu dalam memberikan sanksi kepada setiap warga masyarakat yang melanggar aturan mengenai sewa tanah kas desa.
2. Pemerintah desa hendaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga desa lainnya dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat berupa aspirasi, semangat berkumpul dalam menghadiri rapat serta musyawarah desa. Sedangkan masyarakat hendaknya dapat berkumpul dan memberi aspirasi kepada pemerintah desa demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan desa.
3. Dalam era otonomi desa ini, pemerintah daerah seharusnya memberikan wewenang yang lebih luas kepada Pemerintah Desa Batang Batindih dalam mengurus rumah tangga mereka sendiri dan tidak terlalu ikut campur terhadap kebijakan yang dibentuk pemerintah desa. Kemudian pemerintah daerah hendaknya tidak mempersulit urusan desa seperti persetujuan kepengurusan seperti Peraturan Desa (PERDES).

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Abidin, Zaid Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancar Sawah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Almasdi, Yusuf Suit. 1999. *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arturo, Israel.1990. *Pengembangan Kelembagaan*. Jakarta: LP3ES
- Awang, Azam. 2006. *Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat*.Pekanbaru: Alaf Riau.
- Dunn, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: AMPD Press
- Gulo, W. 2005.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Islamy, Irfan. 1998. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Kartadinata, Sunaryo. 1997. *Pendidikan dan Pengembangan SDM Bermutu Memasuki Abad XXI*. Purwokerto: Makalah Konvensi.
- Mardiasmo, 1999.*Otonomi Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik National*.Jakarta : Seminar Promoting Good Governance 1999.
- Moleong, Lexi J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Munandar, 1999. *Budgeting*. Edisi 1, Yogyakarta : BPFE
- Nogi, Hassel. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Rozaki, Abdul dkk. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Pembangunan Otonomi*. Yogyakarta: IRE Press
- Sanusi, Achmad. 1998. *Pendidikan Alternatif*. Bandung: Garfindo Media Pratama.
- Siregar, Budi Baik. 2002. *Kembali ke Akar; Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*. Jakarta: FPPM.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tangkukisan, Hessel Nogi. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lukman Offset Yogyakarta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Laporan Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan tentang Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Se-Kabupaten Kampar (1-15 Desember 2010)
- b. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.
- c. Jurnal**
- Hendro Pujo Sasongko Adi. 2013. *Jurnal Ilmu Pemerintahan (IP)*. Volume 1 Nomor 4 Kalimantan Timur.
- d. Internet**
- Wikipedia Indonesia (www.Wikipedia.com) diakses pada tanggal 25 September 2014